

Zaid Al Adawi

NIM:217410101014 ANALISIS PERALIHAN ASET BANGUNAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DI KOTA  
LANGSA

(Dr Marlia Sastro, S.H., M.hum, Dr. Yusrizal S.H., M.H)

### **ABSTRAK**

Sebelum proses peralihan aset dilakukan terlebih dahulu dilakukan proses inventarisir. Dan didalam proses tersebut haruslah adanya penghitungan nilai aset agar aset tersebut bisa dialihkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana proses peralihan aset dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Kota Langsa dan Apa yang menjadi hambatan dan upaya hukum dalam proses peralihan aset dari Kabupaten Aceh Timur Kepada Pemerintah Kota Langsa. Hambatan yang terjadi dikarenakan aset tersebut tidak kunjung dialihkan karena ketiadaan titik temu antar kedua pejabat kabupaten kota tersebut dan upaya yang dilakukan ialah adanya konsolidasi antara kedua daerah dalam melakukan percepatan proses peralihan aset.

Jenis Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis empiris sehingga dapat menghasilkan suatu uraian yang mendalam mengenai ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, dan organisasi tertentu dalam konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses peralihan aset harusnya dilakukan satu tahun setelah terpilihnya pejabat Wali Kota langsa. Dan hambatan yang terjadi adalah dikarenakan kedua kabupaten kota ini tidak kunjung melakukan proses pertemuan maupun konsolidasi guna memproses peralihan aset tersebut serta bergantinya pemerintah baru yang menyebabkan tak terjadinya perjanjian dan pembicaraan lebih lanjut mengenai proses peralihan aset. Upaya hukum yang dilakukan ialah kehadiran Lembaga KPK ke Kota Idi guna meninjau secara langsung proses maupun melihat hambatan yang terjadi didalam proses peralihan aset dari Pihak Kabupaten Aceh Timur Kepada pihak Kota Langsa

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus segera memproses peralihan aset tersebut guna melancarkan pelayanan publik Pemerintah Kota Langsa dan juga dari pihak Kota Langsa agar terus membangun konsolidasi dan pertemuan Kepada Pemerintah Aceh Timur agar menemukan titik temu Guna pembangunan Kota Idi sebagai Pengganti Kota Langsa yang menjadi Kota madya baru.

**Kata Kunci : Peralihan, Bangunan, Pemerintah.**

Zaid Al Adawi  
NIM:217410101014

ANALYSIS OF TRANSFER OF EAST ACEH  
DISTRICT GOVERNMENT ASSETS TRANSFER IN  
LANGSA CITY  
(Dr Marlia Sastro, S.H., M.hum, Dr. Yusrizal S.H., M.H)

**ABSTRACT**

Before the asset transfer process is carried out, an inventory process is first carried out. And in this process there must be a calculation of the asset value so that the asset can be transferred.

The formulation of the problem in this research is what is the process of transferring assets from the East Aceh Regency Government to the Langsa City Government and what are the obstacles and legal remedies in the process of transferring assets from East Aceh Regency to the Langsa City Government. The obstacles that occur are because these assets have not been transferred due to the lack of common ground between the two district and city officials and the efforts made are to consolidate between the two regions in accelerating the asset transfer process.

This type of research uses an empirical juridical approach so that it can produce an in-depth description of speech, writing and behavior that can be observed from certain individuals, groups and organizations in the context studied from a complete, comprehensive and holistic point of view.

The research results show that the asset transfer process should be carried out one year after the election of the Mayor of Langsa. And the obstacles that occurred were because these two city districts had not carried out a meeting or consolidation process to process the transfer of assets and the change of new government which resulted in no agreement and further discussions regarding the asset transfer process. The legal effort taken was the presence of the Corruption Eradication Commission (KPK) Institution in Idi City to directly review the process and see the obstacles that occurred in the process of transferring assets from East Aceh Regency to Langsa City.

The conclusion of this research is that the East Aceh Regency Government must immediately process the transfer of these assets in order to facilitate public services from the Langsa City Government and also from Langsa City to continue to build consolidation and meetings with the East Aceh Government to find common ground for the development of Idi City as a replacement for Langsa City which became the new municipality.

**Keywords: Transition, buildings, government.**